

- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Cet. Ke-1, Nuansa, Bandung, 2008.
- L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-25, PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Cet. Ke-5, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2000.
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Cet. Ke-1, Citra Media, Yogyakarta, 2007.
- Mukmin Zakie, *Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia*, Cet. Ke-2, Litera, Yogyakarta, 2013.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Cet. Ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya: Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*, Cet. Ke-1, Setara Press, Malang, 2013.
- Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial*, Cet. Ke-1, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Philippus M. Hadjon (Penyunting), *Pengantar Hukum Perizinan*, Cet. Ke-1, Yuridika, 1993.

- Philipus M. Hadjon, et. al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. Ke-10, Gadjah Mada University Press, 2008.
- Prajudi Atmosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1981.
- Rachmat Trijono, *Hak Menguasai Negara dalam Bidang Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2015.
- Republik Indonesia, *Buku 2: Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cet. Ke-10, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- S.F. Marbun (Penyunting), *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-1, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- _____, *Hukum Administrasi Negara I*, Cet. Ke-1, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-5, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Salim HS, *Hukum Divestasi di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Edisi 1, Cet. Ke-7, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- _____, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Simon Felix Sembiring, *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Cet. Ke-1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*, Cet. Ke-1, PT. Grasindo, Jakarta, 2009.

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cet. Ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Zaini Dahlan, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Edisi 2, Cet. Ke-10, UII Press, Yogyakarta, 2013.

B. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Anwar Habibi Siregar, “Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba”, Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Frisca Cristi, “Akibat Hukum Kewajiban Berbahasa Indonesia Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Terhadap *Production Sharing Contract* (PSC) di Bidang Perminyakan di Indonesia”, Tesis Pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Imam Dermawan, “Kewajiban Divestasi Pada Penanaman Modal Asing di Bidang Pertambangan Umum (Studi Kasus Perjanjian Kontrak Karya Antara PT. Newmont Nusa Tenggara Dengan Pemerintah Indonesia)”, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2009.

Mumin Zakie, “Pelaksanaan Kuasa Pertambangan Kaitannya Dengan Hak Atas Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung”, Tesis Magister pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997.

Price Waterhouse Cooper, *Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide*, 8th Edition, Mei 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

D. Putusan dan Fatwa

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 36/PUU-X/2012.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 22 Tahun 2011.

E. Data Elektronik

<http://daerah.sindonews.com/read/884659/29/5-penjajah-asing-yang-menjarah-kekayaan-indonesia-1405804070>, diakses pada tanggal 9 Desember 2016.

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1126>, diakses pada tanggal 9 Desember 2016.

<http://bps.go.id/brs/view/1158>, diakses pada tanggal 9 Desember 2016.

<https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229>, diakses pada tanggal 9 Desember 2016.

<http://sp2010.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 9 Desember 2016.

<http://ekbis.sindonews.com/read/1156480/33/utang-luar-negeri-naik-jadi-rp4-261-triliun-1479471321>, diakses pada tanggal 9 Desember 2016.

<http://www.gultomlawconsultants.com/perbandingan-peraturan-pertambangan-yang-pernah-berlaku-di-indonesia/#>, diakses pada tanggal 20 Desember 2016.

<http://www.berdikarionline.com/kontradiksi-dalam-uu-mineral-dan-batubara/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2016.

<http://prokum.esdm.go.id/Lain-lain/Lakip/Lakip%20KESDM%20Tahun%202011.pdf>, diakses pada tanggal 2 April 2017.

http://www.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BAB%20IV%20RENSTRA%20DISTAMBEN%202012_2017.pdf, diakses pada tanggal 2 April 2017.

<http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236?>, diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

<http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/emas/item167?>, diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

<http://www.gultomlawconsultants.com/perbandingan-peraturan-pertambangan-yang-pernah-berlaku-diindonesia/#>, diakses pada tanggal 30 Maret 2017.

<http://rumahkeadilan.co.id/index.php/2015/11/11/mengenal-prinsip-pacta-sunt-servandadalam-perjanjian-2/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2017.

<http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/1319522/kuasa-pertambangan-harus-selesaikan-izin-usaha-di-april-2010/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2017.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=256645&val=5870&title=IMPLIKASI%20KEBERADAAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%204%20TAHUN%202009%20BAGI%20%20SEKTOR%20PERTAMBA NGAN%20BATUBARA>, diakses pada tanggal 30 Maret 2017.

<http://eksplorasi.id/kpk-sebanyak-1-222-izin-tambang-sudah-dicabut-dan-tidak-diperpanjang/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2017.

<https://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-%20Tindak%20Lanjut%20Penyelesaian%20Penataan%20IUP/cb06194b232920d9e14a0217c40b5cee2014-02-05-14-56-04.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2017

<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/11/07070051/Supersemar.Surat.Sakti.Penuh.Misteri>, diakses pada tanggal 10 Juni 2017

F. Ensiklopedia

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.